

## KONFRONTASI RUSIA – UKRAINA

Simela Victor Muhamad  
Poltak Partogi Nainggolan

7

### Abstrak

*Konfrontasi terbuka antara Rusia-Ukraina terancam muncul kembali pasca-penangkapan dan penahanan kapal dan pelaut Ukraina di Selat Kerch, di perairan Semenanjung Crimea. Sikap dan respons yang diperlihatkan AL Rusia dan Presiden Putin telah menimbulkan kekhawatiran dunia terhadap pecahnya konfrontasi militer baru antar-kedua negara. Perkembangan situasi regional yang terus mengalami eskalasi ketegangan ini tidak mudah diredam dan diatasi, sekalipun telah dibahas dalam pertemuan G-20 di Argentina. Sebab, masalah berakar dari sejarah hubungan kedua negara di bawah Uni Soviet, dengan peran kontrol bangsa Rusia yang dominan. Kian terisolasinya Rusia oleh ekspansi Uni Eropa dan terkepungnya negeri itu oleh sanksi internasional yang diarahkan kepada Putin dapat menjelaskan sikap responsif Rusia yang tampak agresif belakangan. Tulisan ini menganalisis, mengapa resolusi konflik sulit dicapai, dan bagaimana masyarakat internasional harus menyikapinya.*

### Pendahuluan

Setelah ‘revolusi’ Februari 2014 yang memicu keterlibatan Rusia dalam politik domestik Ukraina, konflik Rusia dan Ukraina kembali memanas dan menjadi perhatian dunia. Kompleksitas dan implikasi konflik yang dapat mengancam stabilitas keamanan Eropa dan, bahkan, global, membuat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Buenos Aires, Argentina yang berlangsung hingga awal Desember 2018 dan dihadiri para kepala negara/pemerintahan *big and middle powers*, seperti Amerika Serikat (AS),

Rusia, Jerman, Prancis, China dan Indonesia menjadikannya sebagai isu yang harus dibahas. Desakan pembahasan muncul karena konflik telah berkembang ke arah konfrontasi militer terbuka (perang) Rusia versus Ukraina pasca-penahanan tiga kapal Angkatan Laut (AL) Ukraina dan 24 awak kapal mereka oleh Rusia di Selat Kerch pada 25 November 2018.

Insiden dipicu oleh tuduhan Pemerintah Rusia bahwa AL Ukraina telah melanggar wilayah perairan Rusia, perairan yang memisahkan Semenanjung Crimea dengan





Sumber: Euromaidan Press, November 2018.

**Gambar 1. Jalur pelayaran kapal Ukraina yang ditahan Rusia di Selat Kerch**

daratan Rusia (Gambar 1). Menurut pihak Rusia, kapal-kapal Ukraina tersebut telah melanggar batas wilayah negaranya. Sebaliknya, Ukraina bersikeras bahwa kapal-kapal mereka telah berlayar sesuai jalur internasional. Sebelum ini, secara historis Crimea memang merupakan bagian dari Ukraina, tetapi pasca-2014, lewat referendum yang dimenangi oleh kubu pro-Moskow, wilayah itu diklaim menjadi bagian dari Rusia.

Ketegangan lalu muncul, terutama setelah masing-masing pihak memobilisasi kekuatan militernya untuk mengantisipasi kemungkinan serangan di antara mereka. Perang terbuka pun berpotensi kembali terjadi, seperti di tahun 2014, yang bisa mengancam tidak hanya stabilitas dan keamanan Eropa, namun juga global. Kajian ini menganalisis mengapa resolusi konflik sulit dicapai di antara Rusia dan Ukraina, dan bagaimana masyarakat internasional harus menyikapinya?

### **Perebutan Kedaulatan dan Ruang Pengaruh di Eropa**

Deklarasi Kemerdekaan 11 Maret 2014 oleh kelompok separatis Crimea, lewat Undang-Undang Mironov, yang menyatakan permintaan bergabung penuh dengan Rusia, menjadi awal konflik Ukraina-Rusia. Referendum pada 30 Mei 2014, yang mengungkap secara kontroversial akses penuh dengan Rusia, ditolak Pemerintah Ukraina dan dunia internasional, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas teritorial, kedaulatan nasional dan hukum internasional. Sebab, hal itu dilakukan di bawah pengaruh (kepentingan) negara lain, sedangkan Presiden Rusia, Vladimir Putin, tidak menganggapnya sebagai upaya aneksasi, dengan alasan, Crimea sebagai negara berdaulat dan bukan bagian dari Ukraina.

Konfrontasi militer kedua negara (Ukraina dan Rusia) tidak terlelakkan, sebelum kemudian Majelis Umum PBB campur

tangan dengan mengeluarkan Resolusi 68/262, yang menyatakan referendum ilegal. Rusia yang telah melakukan intervensi militer lalu diberikan sanksi, dengan pelarangan para pejabat dan politisinya untuk bepergian ke Kanada, AS, dan Uni Eropa (UE). Jepang juga menjatuhkan sanksi dengan menunda pembicaraan kerja sama militer, ruang angkasa, investasi, dan pengetatan visa. Sebaliknya, Rusia membalas dengan menjatuhkan sanksi serupa pada negara penentangannya, dengan menarik miliaran dana mereka dari bank-bank Eropa. Ketegangan hubungan Rusia-Ukraina lalu berkembang menjadi ketegangan hubungan Rusia-Eropa, dengan kedua belah pihak saling menjatuhkan sanksi ke sektor-sektor lainnya.

Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Rusia di bawah Putin tidak bergeming terhadap kritik dan tekanan negara-negara Eropa? Sikap masih memiliki kedaulatan atas dan kewibawaan di Ukraina, yang merupakan bekas wilayahnya dalam periode Perang Dingin, menumbuhkan kembali sikap Rusia untuk menjadi patron di Semenanjung Crimea. Hal ini didukung oleh kekuatan ekonomi dan militer yang masih dimiliki Rusia, sehingga dapat menciptakan daya tawar dalam eskalasi ketegangan yang berlangsung. Sikap *show off* ini memang ingin diperlihatkan oleh Putin, pemimpin Rusia yang semakin kuat kedudukannya di dalam negeri.

Dengan kemampuannya untuk melakukan unjuk kekuatan negaranya di luar wilayahnya, terutama di Eropa, Putin ingin menghentikan upaya isolasi Barat

yang dapat membuatnya semakin teralienasi di daratan Eropa akibat ekspansi UE ke bekas negara-negara baru bekas wilayahnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan, jika kemudian Putin mampu menggelar *proxy war* di Timur-Tengah, dengan langkahnya yang sukses dalam mempertahankan rezim Bashar Al-Assad dan kepentingan regional Iran di Suriah dalam beberapa tahun belakangan, walaupun sekutunya itu harus menghadapi gempuran koalisi Barat dan AS. Friksi Eropa dengan AS yang kian mendalam pasca-terpilihnya Trump, lewat pemilu yang sukses diintervensinya itu, telah memuluskan upaya Putin, untuk merenggut kembali kontrol atas kedaulatan dan ruang pengaruh (*sphere of Influence*), yang marak diperebutkan di era Perang Dingin (1945-1990).

### **Mendorong Pendekatan Multilateral**

Insiden yang terjadi di Selat Kerch, Laut Hitam, Semenanjung Crimea, pada 25 November 2018, telah meningkatkan ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Tidaklah berlebihan jika perkembangan ini memperlihatkan konflik kedua negara, yang sebenarnya juga merepresentasikan konflik Rusia-Eropa, tengah memasuki babak baru yang lebih keras. Pasca-insiden, Rusia telah memobilisasi kekuatan militernya di kawasan perbatasan dekat Ukraina, antara lain dengan menempatkan batalion keempat sistem rudal pertahanan udara S-400 di Crimea, yang sangat berbahaya tidak hanya untuk Ukraina, tetapi seluruh wilayah Laut Hitam.

Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, sendiri menilai, kehadiran militer Rusia di wilayah perbatasan kali ini adalah yang terbesar sejak negara itu menganeksasi Semenanjung Crimea pada tahun 2014. Untuk merespons ancaman kehadiran militer Rusia tersebut, Ukraina memberlakukan status darurat militer selama 30 hari di kawasan yang berbatasan dengan Rusia. Sebelum terjadi penyerangan terhadap kapal-kapal Ukraina, kedua negara sebenarnya telah terlibat dalam apa yang dikatakan sebagai perang yang tidak kelihatan atau tersembunyi (*hidden war*). Salah satu contohnya adalah pertempuran di Ukraina Timur antara kelompok pemberontak separatis Crimea yang didukung Rusia vis a vis militer Ukraina. Berbagai laporan selama ini telah mengungkap, bahwa hampir 1.000 orang tewas karena konflik di Ukraina Timur (*bbc.news.com*, 1 Desember 2018).

Insiden Selat Kerch juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Rusia yang terus memperketat arus pelayaran di sekitar Semenanjung Crimea, terutama terhadap kapal-kapal Ukraina. Dua pelabuhan di pesisir utara, yakni Berdyansk dan Mariupol, selama ini memainkan peranan krusial dalam ekspor biji-bijian dan baja, sekaligus impor batu-bara Ukraina. Secara kontradiktif, Perjanjian 2003 antara Ukraina dan Rusia telah menjamin kebebasan berlayar bagi kapal-kapal asal kedua negara. Sikap Rusia yang berubah, yang menunjukkan perilaku agresif akhir-akhir ini, dengan melakukan pemeriksaan kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan-pelabuhan Ukraina, menimbulkan

tanda tanya sekaligus kecemasan Kiev. Sementara, Moskow membela diri dengan mengatakan, pemeriksaan yang baru diputuskan dan dilakukannya tersebut diperlukan untuk alasan keamanan, merujuk pada ancaman bahaya dari kaum radikal Ukraina.

Ketegangan Rusia-Ukraina tidak saja telah berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga dapat berdampak pada situasi keamanan regional Eropa, akibat konfrontasi terbuka antara kekuatan angkatan bersenjata yang telah dan dapat terus terjadi. Sikap Rusia yang agresif di era pasca-Perang Dingin memang tidak dapat dilepaskan dari sikap Presiden Putin yang sulit menunjukkan sikap kooperatif untuk menyelesaikan krisis dan konflik yang terjadi selama ini, dan melibatkan Rusia secara langsung maupun tidak, melalui jalur diplomasi. Penyelesaian kasus penembakan pesawat MH-17 pada 17 Juli 2014 oleh rudal Rusia di atas wilayah udara Ukraina (*Deutsche Welle*, 25 Mei 2018) adalah contoh lain yang juga telah menyulitkan dunia dalam mencari solusi damai atas masalah global yang muncul, khususnya terkait konflik Rusia-Ukraina.

Dunia internasional menyadari kemungkinan implikasi yang akan muncul, sehingga forum KTT G-20 di Argentina telah mengangkat insiden di Selat Kerch penting untuk disikapi. Para kepala negara/pemerintahan yang hadir dalam KTT G-20 pun telah mendorong Putin untuk bersikap lebih terbuka dan luwes dalam menyelesaikan konflik di Crimea melalui meja perundingan (diplomasi) dan forum-forum multilateral. Ini artinya, ketika upaya secara bilateral sulit

dicapai, pendekatan diplomasi melalui forum multilateral perlu didorong oleh masyarakat internasional untuk mengatasi konflik Rusia-Ukraina.

### Penutup

Konflik Rusia-Ukraina berakar dari sejarah eksistensi kedua negara tersebut di bawah Uni Soviet dalam periode Perang Dingin. Padahal, sebelum terbentuknya Uni Soviet di tahun 1922, kedua bangsa dan negara itu sudah hidup berdampingan. Berakhirnya Perang Dingin, dan pembentukan serta perluasan Uni Eropa, telah mempengaruhi perkembangan hubungan kedua negara. Agresi, aneksasi, konflik dan konfrontasi terbuka adalah berbagai bentuk hubungan buruk yang muncul, di tengah ketidakmampuan para pemimpin kedua negara dan internasional dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang terjadi kemudian. Kompleksitas masalah yang muncul kemudian telah menjelaskan, mengapa resolusi konflik sulit dicapai di antara Rusia dan Ukraina.

Sebagai konsekuensinya, masyarakat internasional, terutama PBB, tidak boleh berhenti untuk terus mendorong dilakukannya pendekatan dan solusi multilateral terhadap konflik-konflik bilateral yang berimplikasi luas (regional dan global). Langkah aktif Indonesia belakangan ini di bawah Presiden Jokowi Widodo dan Menlu Retno Marsudi untuk mengampanyekan pendekatan multilateral atas konflik-konflik dunia patut ditindaklanjuti dan didukung, termasuk oleh parlemen (DPR). Dunia harus dapat menyadari, dengan mendorong pendekatan multilateral, solusi

efektif dan komprehensif atas berbagai masalah dan konflik antarnegara dapat dilakukan. Setidaknya, penyelesaian konflik antarnegara tidak didominasi oleh kekuatan satu negara, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan bersama dari negara yang sedang berkonflik, dan juga kepentingan internasional yang lebih luas.

### Referensi

- "Belanda, Australia: Rusia Harus Bertanggung Jawab Atas Penembakan Pesawat MH17," *Deutsche Welle* (DW), 25 Mei 2018, <https://p.dw.com/p/2yJqd>, di akses 6 Desember 2018.
- Buckley, Cynthia, Ralph Clem, Jarod Fox and Erik Herron, "The war in Ukraine is more devastating than you know," *The Washington Post*, April 9, 2018, di akses 6 Desember 2018.
- "Krisis Rusia Ukraina Warnai Konferensi", *Kompas*, 29 November 2018, hal. 8.
- Menon, Rajan and Eugene B. Rumer. *Conflict in Ukraine The Unwinding of the Post-Cold War Order*. The MIT Press, 2015.
- Mitchell, Sara McLaughlin, "Could the new fighting between Russia and Ukraine escalate into all-out war?" *The Washington Post*, December 5, 2018, di akses 6 Desember 2018.
- Poroshenko, Petro. "For Ukraine, Putin must be punished", *The New York Times*, 7 Desember 2018, hal. 1.
- "Rusia tembak dan tahan tiga kapal Ukraina, ketegangan meningkat", *bbc.news.com*. (1 Desember 2018), <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46339585>, di akses 2 Desember 2018.
- Wood, Elizabeth A, William E. Pomeranz, E. Wayne Merry, and Maxim.

Trudolyubov. (2015). *Roots of Russia's War in Ukraine*. Woodrow Wilson Center Press/Columbia University.



Simela Victor Muhammad  
[simela.muhamad@dpr.go.id](mailto:simela.muhamad@dpr.go.id)



Poltak Partogi Nainggolan  
[partogi.nainggolan@dpr.go.id](mailto:partogi.nainggolan@dpr.go.id)

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. adalah Peneliti Madya bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1986, dan Pascasarjana (S2), Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia, 1999. Aktif sebagai peneliti pada Puslit BKD DPR RI, yang bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya" (bagian dari buku Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara, 2017); dan "Peran Asian Parliamentary Assembly dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel" (artikel di Jurnal Politica, Vol. 8 No. 1, Mei 2017).

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia pada tahun 1986, pendidikan S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) pada tahun 1999, dan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert-Ludwids-Universitaet Freiburg (Deutschland) pada 2011 dengan *judicium magna cum laude*. Beliau adalah seorang Profesor Riset bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Kemitraan Strategis Indonesia- Amerika Serikat - RRC di Asia Pasifik" (2013), "Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis" (2015), "Ancaman Keamanan terhadap ALKI" (2015), dan "Indonesia di Tengah Persaingan China, Jepang, dan India" (2017).

#### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.